



## NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Gubernur Banten  
Dari : Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten  
Tembusan : Yth. Bapak Wakil Gubernur Banten  
Yth. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Banten  
Yth. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
Tanggal : April 2018  
Nomor :  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Laporan Hasil Rapat Gabungan FKD-MPU XVIII Tahun 2018 di Surabaya Jawa Timur.**

---

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan Surat Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Sekretariat Bersama Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) Nomor : 217/-072.34/MPU/IV/2018 Tanggal 16 April 2018 Perihal Pemberitahuan Rapat Gabungan FKD-MPU XVIII Tahun 2018, dengan ini kami sampaikan hasil Rapat Gabungan tersebut sebagai berikut :

- I. Rapat Gabungan FKD-MPU XVIII Tahun 2018 dirangkaikan dengan Rapat Khusus Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), dilaksanakan pada tanggal 19 s.d 21 April 2018 bertempat di JW. Marriott Hotel, Jl. Embong Malang No. 85-89 Surabaya - Jawa Timur, dibuka secara resmi oleh Gubernur Jawa Timur dan ditutup oleh Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jawa Timur.
- II. Rapat Gabungan FKD-MPU XVIII Tahun 2018 dan Rapat Khusus APPSI dihadiri oleh para Gubernur selaku Dewan Pengurus APPSI, Asisten Pemerintahan Provinsi anggota MPU atau yang mewakili, Kepala Bappeda, Kepala Dinas/Badan terkait, Kepala Biro Pemerintahan, Kabag dan Kasubag yang menangani Kerjasama, dan Sekretariat Bersama FKD-MPU.
- III. Rangkaian Acara Rapat Gabungan FKD-MPU XVIII Tahun 2018 dan Rapat Khusus APPSI, meliputi :
  - A. Serah terima jabatan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) sisa masa jabatan 2015-2019, dari Gubernur Sulawesi Selatan (Dr. H. Syahrul Yasin Limpo) kepada Gubernur Jawa Timur (Dr. H. Soekarwo).
    - Dalam sambutan serah terima jabatan, Dr. H. Syahrul Yasin Limpo menegaskan bahwa pemerintah pusat harus secara serius melakukan koordinasi di tingkat kementerian/lembaga dalam pembuatan kebijakan dan regulasi, terutama terkait penugasan kepada kepala daerah. Tujuannya agar tidak menimbulkan kebingungan dan multitafsir yang bisa menghambat efektivitas kebijakan. Dengan demikian tidak ada lagi

institusi pusat turun ke daerah tanpa melakukan koordinasi dengan gubernur.

- Dr. H. Soekarwo sebagai Ketua Umum APPSI yang baru, menyampaikan empat prioritas utama yang akan dilakukan, yakni :
  - (1) Menyampaikan kepada seluruh lembaga pemeriksa tentang legalitas organisasi APPSI. Legalitas tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 363 dan 364. Dengan demikian, tidak ada keraguan lagi terhadap legalitas sumber pendanaan organisasi APPSI.
  - (2) Mengoptimalkan fungsi APPSI sebagai jalan menuju kesejahteraan masyarakat melalui tiga upaya, yakni meningkatkan pemberdayaan masyarakat lewat kelembagaan, pelayanan publik, serta mengajak masyarakat secara bersama-sama guna menemukan solusi yang terbaik dan tepat untuk meningkatkan kesejahteraan.
  - (3) Mempertegas konstruksi yuridis terkait posisi gubernur dalam fungsi kewilayahan dimata pemerintah pusat. Kejelasan posisi ini sangat penting agar gubernur benar-benar bisa aman dan tidak salah langkah, apalagi sampai terjerat masalah ketika melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka melaksanakan program dan pembangunan di wilayahnya.
  - (4) Melanjutkan program-program dari Ketua Umum APPSI sebelumnya.

#### B. Pengarahan Gubernur Jawa Timur :

- Rapat Gabungan FKD-MPU hendaknya bukan alat untuk menjelaskan secara terperinci kebijakan Gubernur, tapi mempersiapkan agar suatu rapat bisa berjalan dengan maksimal dan menghasilkan sesuatu yang bagus, khususnya kesejahteraan masyarakat.
- FKD-MPU diharapkan ikut menjawab tantangan Indonesia kedepan diantaranya bisa menguasai pasar ASEAN, dimana 40 persen *captive market* ASEAN atau sekitar 261 juta penduduk ASEAN berada di Indonesia. Untuk itu, harus ada rekonstruksi baru terhadap pasar yang ada di Indonesia sehingga tidak semata-mata menjadi pasar besar bagi negara lain.
- Kelemahan Indonesia adalah masih dilakukannya impor bahan baku produksi dari negara lain. Sebagai contoh, Jawa Timur masih mengimpor bahan baku pupuk kalium florida dari Laos. Padahal bahan tersebut ada di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara. Apabila FKD-MPU bisa memberikan masukan dan menyiapkan bahan tersebut maka tidak akan ada impor komoditi ini. Untuk itu, wajib dibuat sistem informasi tentang ketersediaan material yang ada di Indonesia, yang di Jawa Timur dinamakan Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok (Siskaperbako). Apabila hal ini tidak dilakukan, selamanya Indonesia akan terus membeli bahan baku dari negara lain dan selalu terbawa arus *digital economy* yang mengarah pada *digital trading* bukan pada *digital industri*.

#### C. Sidang Kelompok :

1. **Kelompok Kebijakan**, dengan hasil sidang sebagai berikut :
  - a. Perlunya fasilitasi dan advokasi kelompok kebijakan dari masing-masing provinsi untuk penganggaran program kerjasama OPD.
  - b. Dalam rangka transfer informasi, Sekretariat Bersama FKD-MPU akan mempertemukan Gubernur terpilih pada Pilkada Tahun 2018 dengan Gubernur terdahulu, dalam suatu forum rapat khusus yang

akan dilaksanakan pada bulan November 2018 di Provinsi DKI Jakarta.

- c. Sekretariat Bersama FKD-MPU akan memfasilitasi penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) dengan mengundang tenaga ahli/pakar dengan mengangkat tema-tema aktual.
- d. Produk hukum MPU akan dibahas lebih lanjut di Sekretariat Bersama dengan mengundang seluruh provinsi anggota FKD-MPU.

2. **Kelompok Teknis I**, Penanganan Bersama Warga Binaan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) / Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), dengan hasil sidang sebagai berikut :

.....  
.....

3. **Kelompok Teknis II**, Integrasi Informasi Pangan dan Pengendalian Inflasi Daerah Anggota Mitra Praja Utama, dengan hasil sidang sebagai berikut :

.....  
.....

4. **Kelompok Teknis III**, Pembentukan Pusat Tourism, Trade, Investment Mitra Praja Utama di Jakarta, dengan hasil sidang sebagai berikut :

.....  
.....

Demikian kami laporkan, mohon menjadi periksa dan diucapkan terima kasih.

**KEPALA BIRO PEMERINTAHAN,**



**GUNAWAN RUSMINTO, AP, M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19741004 199402 1 002